

Sistem Ekonomi Islam (Asas dan Kaedah Umum)

Tim Dosen

Ilmu Ekonomi dan Keuangan Islam

Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis
Universitas Pendidikan Indonesia



TABLE OF CONTENTS

1

Pilar-Pilar Ekonomi Islam:

Distribusi harta (oleh individu dan negara secara ekonomis dan non ekonomis)

2

Politik ekonomi Islam



UPI FPB IEKI
ILMU EKONOMI & KEUANGAN ISLAM



AQAS

AGENCY FOR
QUALITY ASSURANCE
AND ACCREDITATION
IN
EDUCATION

AACSB
Business
Education
Alliance
Member

**Kampus
Merdeka**
SINERGI KEMAJUAN



**PILAR-PILAR EKONOMI ISLAM:
DISTRIBUSI HARTA (OLEH INDIVIDU
DAN NEGARA SECARA EKONOMIS
DAN NON EKONOMIS)**

DISTRIBUSI ANTAR INDIVIDU SECARA EKONOMIS

● Distribusi antar individu secara ekonomis adalah terjadinya proses distribusi antar individu di dalam pasar Syariah (semua transaksi antar individu yang berkaitan dengan barang dan jasa yang dilakukan di pasar menggunakan mekanisme syariat Islam)

● Maksud dari “secara ekonomis” adalah segenap dorongan transaksi yang dilakukan antar individu dalam rangka mengembangkan harta yang telah dimilikinya tersebut (disebut juga dengan istilah motif ekonomi)

● Adanya aturan-aturan dalam pengembangan kepemilikan dalam ekonomi Islam secara tidak langsung akan membawa implikasi terjadinya distribusi harta kekayaan di tengah-tengah manusia secara ekonomis



Contoh Distribusi Antar Individu Secara Ekonomis



- Pengembangan Harta di bidang pertanian dengan memproduksi lahan pertanian yang dimiliki
- Hasil pertanian dijual, petani mendapatkan uang
- Petani memakai uang untuk membeli kebutuhan (misal: pakaian)



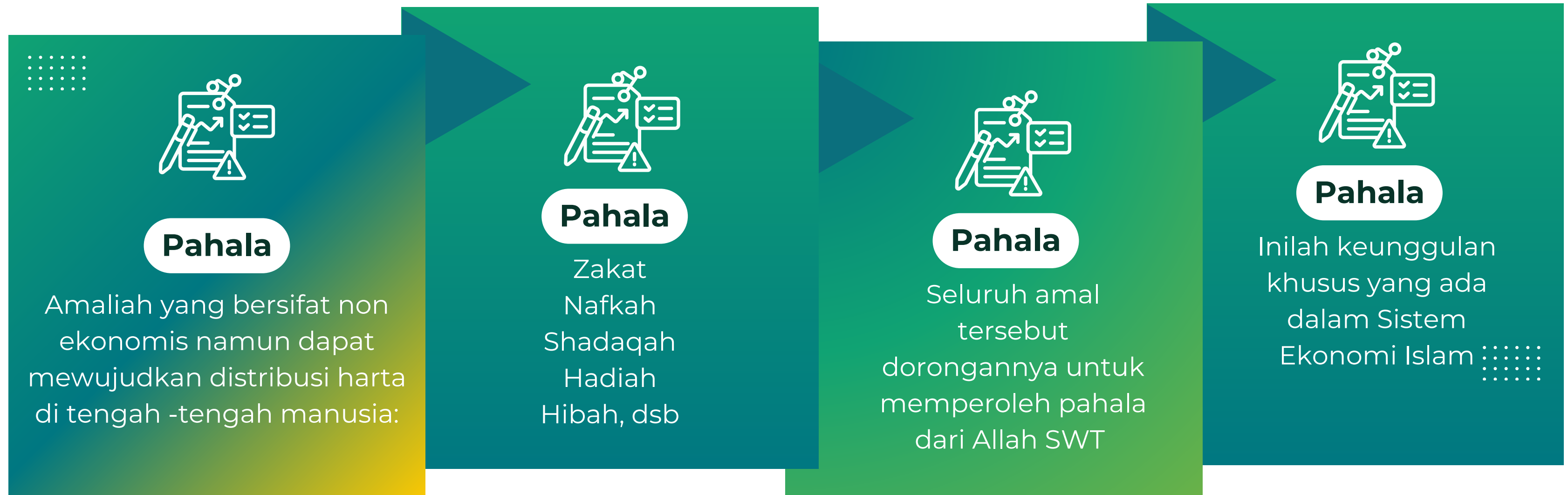
- Pedagang pakaian mendapatkan uang
- Pakaian tersebut diperoleh dari produsen di bidang industri pakaian jadi
- Uang yang diterima pengusaha pakaian digunakan untuk membayar upah pegawai



- **Demikian seterusnya**
- Semua bidang pengembangan harta kekayaan jika diupayakan oleh segenap individu tentu akan berimplikasi pada terdistribusikannya harta kekayaan di tengah-tengah masyarakat

DISTRIBUSI ANTAR INDIVIDU SECARA NON EKONOMIS

Distribusi antar individu secara non ekonomis adalah terjadinya proses distribusi antar manusia yang muncul karena adanya dorongan untuk memperoleh pahala dari sisi Allah SWT



Distribusi secara non ekonomis ini tidak akan dapat ditemukan dalam sistem ekonomi apapun buatan manusia. Sebab, motif yang mendorong distribusi harta kekayaan ini tidak hanya berdimensi dunia, tetapi juga memiliki dimensi akhirat.

DISTRIBUSI ANTAR INDIVIDU SECARA NON EKONOMIS

Seseorang yang mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah SWT akan diberi pahala yang besar

Motif non ekonomi buatan manusia dorongannya hanya dalam wilayah perasaan (kasihan dan kemanusiaan)



STEP 1



STEP 2



STEP 3



STEP 4

AKHIRAT

Dorongan tersebut lebih besar dan lebih kuat pengaruhnya dibandingkan sekedar rasa kasihan

Sedangkan sistem ekonomi Islam memiliki dimensi akhirat. Pengaturannya pun jelas yaitu terdapat hukum wajib, sunnah, dll

DISTRIBUSI OLEH NEGARA

Distribusi harta kekayaan oleh negara adalah adanya peran negara, baik secara tidak langsung (secara ekonomis atau melalui mekanisme pasar Syariah), maupun secara langsung (secara non ekonomis) dalam pendistribusiannya

- Dalam ekonomi kapitalisme, peran negara sebagai kebijakan fiskal. Penyusunan anggaran belanjanya dituangkan dalam nota APBN
- Dalam Sistem Ekonomi Islam, kebijakan penyusunan anggaran negara dikelola oleh Baitul Mal

Prinsip Dasar Penyusunan Baitul Mal

Perbedaan prinsip yang paling mendasar antara APBN Kapitalisme dan Baitul Mal adalah menyangkut sumber-sumber utama pendapatannya dan alokasi pembelanjannya



Dalam menyusun APBN-nya, pemerintah harus selalu merujuk kepada prinsip anggaran berimbang (pengeluaran dan penerimaan harus seimbang)

Dalam ekonomi kapitalisme, sumber utama pendapatan negara adalah PAJAK yang dipungut dari rakyatnya. Sedangkan pengeluaran (belanja) utamanya adalah untuk membiayai kebutuhannya sendiri seperti: administrasi negara, dll.



Apabila belanja negara lebih besar dari sumber penerimaannya, maka terjadi defisit fiskal. Cara menutupinya yaitu dengan:

- Penjualan obligasi
- Pinjaman dari bank sentral (mencetak uang baru)
- Pinjaman di pasar uang/modal
- Pinjaman dari negara lain

Prinsip Dasar Penyusunan Baitul Mal

1

Sumber-sumber penerimaan Baitul Mal sama sekali tidak mengandalkan dari sektor pajak

2

Negara sedapat mungkin tidak memungut pajak dari rakyatnya

3

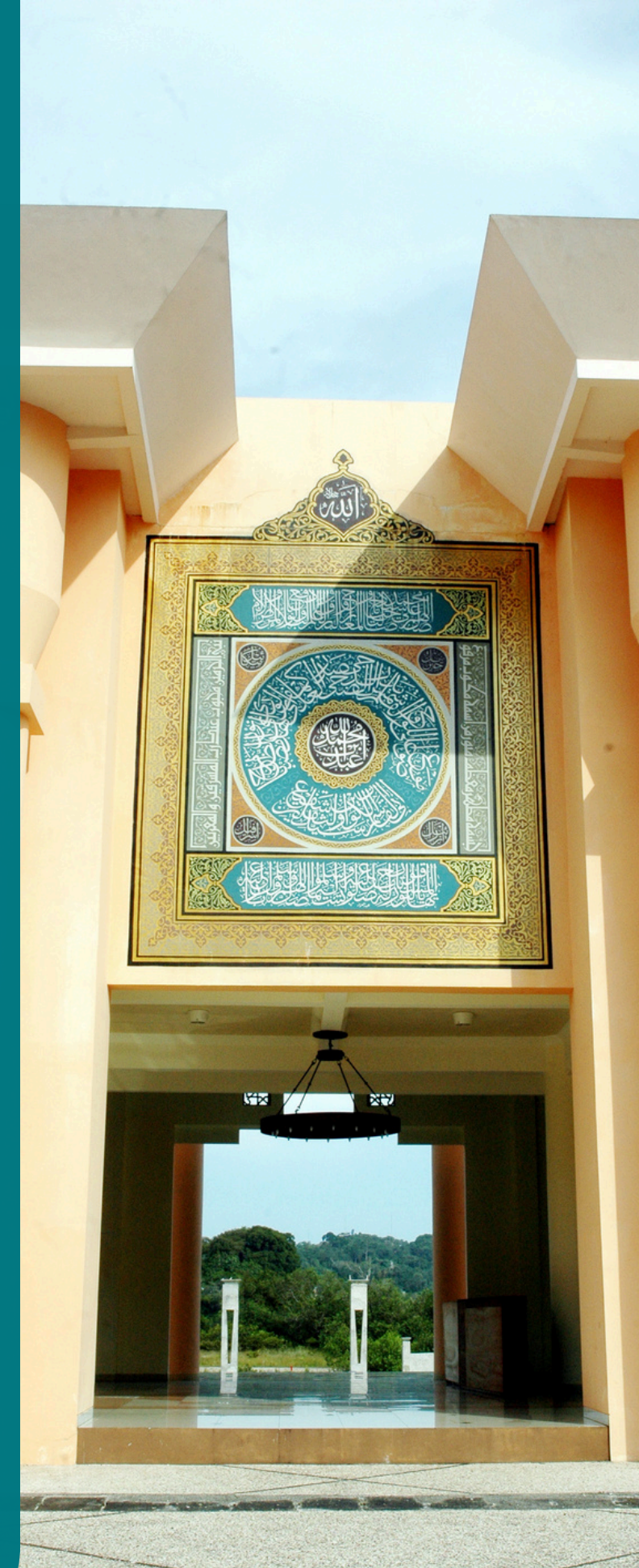
Sumber-sumber utama penerimaan negara untuk kas Baitul Mal seluruhnya telah digariskan oleh Syariat islam.

4

Kepala Negara (Khalifah) memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pos-pos pengeluarannya, besaran dana yang harus dialokasikan dengan mengacu pada prinsip syariat Islam (untuk kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh rakyatnya) agar jangan sampai harta berputar di kalangan orang-orang kaya saja

3 Sumber Utama Kas Baitul Mal

- **Dari sektor kepemilikan individu,**
e.g: shodaqoh, hibah, zakat
- **Dari sektor kepemilikan umum**
e.g: minyak bumi, gas, batubara
- **Dari sektor kepemilikan negara**
e.g: jizyah, kharja, fa'l, usyr



Kaidah Pembelanjaan Baitul Mal

1

Penerimaan dari zakat

Pos pengeluarannya wajib hanya diperuntukkan 8 ashnaf

2

Pos pembelanjaan wajib dan bersifat tetap

Untuk keperluan jihad dan menutup kebutuhan orang-orang fakir dan miskin

3

Pos pembelanjaan wajib dan bersifat tetap

Untuk memberikan gaji kepada pegawai negeri, hakim, tentara

4

Pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat wajib

Jika sarana tersebut tidak ada maka akan menimbulkan kemudharatan, contoh: pembangunan jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit, dll.

5

Pos pembelanjaan wajib bersifat kondisional

Untuk menanggulangi terjadinya musibah atau bencana alam yang menimpa rakyat, contoh: gempa bumi, banjir, dll

5

Pembangunan sarana kemaslahatan rakyat yang bersifat tidak wajib

Sarana tersebut hanya bersifat penambahan sarana-sarana yang sudah ada. Jika tidak ada, tidak akan menimbulkan kemudharatan

Kaidah Pembelanjaan Baitul Mal

Pengeluaran Kas Baitul Mal menurut sektor-sektor pemasukannya:

Sektor Kepemilikan Individu

Pemasukannya berupa zakat, infaq dan shadaqah (masuk kas khusus dan tidak boleh dicampur dengan sektor lain). Pengeluaran zakat hanya untuk delapan (8) asnaf. Sedangkan infaq dan shadaqah untuk kemaslahatan ummat

Sektor Kepemilikan Umum

Alokasi kepemilikan umum untuk kepentingan:

1. Biaya administrasi dan eksploitasi sumber daya alam
2. Membagikan sumber daya alam secara langsung kepada masyarakat
3. Sebagian dari kepemilikan umum ini dapat dialokasikan untuk biaya jihad dan perlengkapannya, bekal pasukan perang, dll

Sektor Kepemilikan Negara

Pemasukannya berupa fa'i, ghanimah, kharaj, seperlima rikaz, 10% dari tanah usyuriyah, jizyah, waris yang tidak habis dibagi, harta orang murtad. Pengeluarannya diserahkan pandangan dan ijtihad khalfah untuk kepentingan negara dan kemaslahatan ummat

Pengaturan Pengeluaran Baitul Mal

Pengaturan pengeluaran yang harus dilakukan oleh seorang Kepala Negara (khalifah) adalah dikembalikan pada jenis-jenis dari pos-pos pengeluarannya:



Untuk pos pengeluaran pertama (zakat),

Pengeluaran yang harus dilakukan berdasarkan banyaknya zakat yang masuk ke kas Baitu Mal, kemudian disalurkan pada 8 asnaf



Untuk pos pengeluaran kedua-kelima, Khalifah

harus mengeluarkan harta sebagai kewajiban negara untuk memenuhi hak-hak rakyat sesuai kondisinya masing-masing



Jika Kas Baitul Mal mengalami kekurangan, pemerintah dapat menarik *dharibah* (pajak) dari kaum muslim untuk memenuhi kekurangan yang dapat menimbulkan kemudharatan apabila tidak dipenuhi. **Pajak ini bersifat temporal**



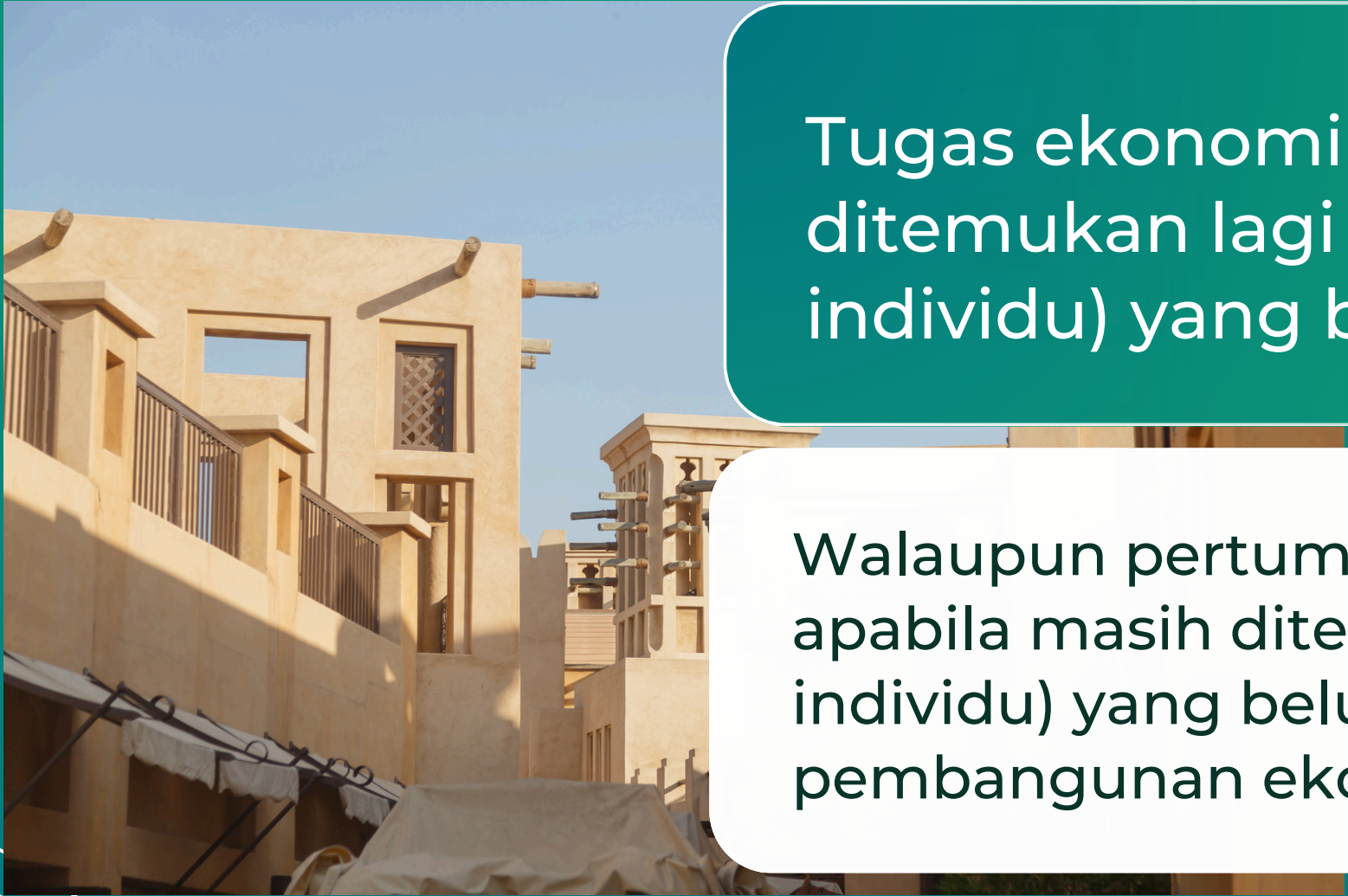
Apabila pemenuhan kekurangan tidak akan menimbulkan kemudharatan serius, maka pemenuhan kekurangan dapat ditunda sampai adanya pemasukan harta lagi



Untuk pembelanjaan pembangunan yang tidak wajib, pengeluarannya harus didasarkan pada ketersediaan Kas Baitul Mal

APLIKASI PENGELUARAN KAS BAITUL MAL

Pengeluaran Kas Baitul Mal yang paling utama adalah digunakan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan pokok individu terutama berupa: sandang, pangan, dan papan bagi setiap individu rakyatnya



Tugas ekonomi negara dikatakan berhasil apabila sudah tidak ditemukan lagi warga negara (walaupun hanya satu orang individu) yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.

Walaupun pertumbuhan ekonomi suatu negara itu tinggi, namun apabila masih ditemukan ada warga negara (walaupun hanya satu orang individu) yang belum dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, maka pembangunan ekonomi negara itu dapat dikatakan telah GAGAL



Rakyat yang hidup dalam naungan sistem ekonomi Islam, tidak memiliki beban hidup yang terlalu berat

Bagi rakyat, yang penting adalah senantiasa bersungguh-sungguh untuk mencari penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan primernya. Boleh memenuhi kebutuhan sekunder asalkan halal dan tidak boros

Negara memberikan fasilitas Pendidikan, kesehatan, dan keamanan secara gratis. Begitu pun dengan energi (BBM, gas), listrik, air bersih, dll, karena semua itu milik dan hak rakyat, negara hanyalah mengelola dan mendistribusikannya



2

POLITIK EKONOMI ISLAM

POLITIK EKONOMI ISLAM

Politik ekonomi adalah target yang dikehendaki oleh hukum-hukum yang menangani pengaturan berbagai urusan manusia.

Politik ekonomi dalam Islam adalah menjamin pemenuhan semua kebutuhan primer (basic needs) setiap individu maupun kebutuhan-kebutuhan sekundernya sesuai dengan kadar kemampuannya sebagai individu yang hidup dalam suatu masyarakat dengan gaya hidup tertentu.

Asas Politik Ekonomi Islam:

- 01** Pandangan bahwa setiap orang, secara individual, perlu dipenuhi berbagai kebutuhannya
- 02** Pandangan bahwa kebutuhan-kebutuhan primer (*basic needs*) setiap manusia harus dipenuhi secara menyeluruh
- 03** Pandangan bahwa usaha mencari rezeki hukumnya mubah/halal. Hukum ini berlaku bagi setiap orang
- 04** Pandangan bahwa nilai-nilai luhur harus mendominasi semua interaksi yang terjadi antar individu di tengah-tengah masyarakat



جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا كَثِيرًا



IEKIUPIMUMTAZ



IEKI UPI



IEKIUPI



IEKI.UPI.EDU